

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Partai Politik**

Partai politik merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi suatu negara. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik dinegara tersebut karena pada dasarnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingan. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multi partai dan terdapat 312 suku yang melatarbelakangi pandangan politik yang berbeda satu sama lain. Seperti dalam melaksanakan suatu pemilihan seorang pemimpin daerah maupun nasional maka diperlukannya suatu institusi politik yang dapat melahirkan pemimpin yang menciptakan kebebasan berkompetisi, serta berpartisipasi politik dalam negara demokratis dikenal dengan partai politik.

Partai politik menurut Inu Kencana Syafi'i adalah "sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level negara" (Kencana, 2002:58). Partai politik merupakan sekelompok warga negara yang memiliki persamaan persepsi dan kepentingan bersama dimana tujuannya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam negara. Disisi lain, kegiatan

seseorang maupun sekelompok orang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partai politik lahir dalam masyarakat secara spontan, karena adanya tuntutan keadaan pada saat itu sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain.

Pendapat lain tentang partai politik yang dikemukakan oleh Mariam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama . tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. R. H. Soltau di kutip oleh Mariam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa :

*“A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government dan carry out their general policies”* (“partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, banyak yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka”) (Soltau dalam Budiardjo, 2000:161).

Partai politik yang terorganisir dapat mewujudkan tujuannya, dimana setiap tujuan terdapat suatu kesatuan politik. Umumnya partai lahir atas dasar perjanjian warga negara yang terorganisasi secara baik. Keragaman persepsi dalam partai politik terutama dalam menyikapi persoalan politik, maka partai politik dapat memilih suatu tujuan yang dikehendakinya. Suatu tujuan yang dimiliki partai politik biasanya tidak terlepas dari suatu pengaruh kekuasaan politik untuk menguasai, melaksanakan dan mempertahankan tujuan tersebut baik dalam lingkup partai politik maupun pemerintah.

Seperti yang dikemukakan oleh Raymond Garfield Gattel yang kemudian dikutip oleh Widagdo dalam buku Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, mendefinisikan partai politik sebagai berikut :

*“ A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and, by the use of their voting power, aim control the government and carry out the general policies”* (“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”) (Gattel dalam Widagdo, 1996:6).

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Serta kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Partai politik juga merupakan suatu alat kesatuan teknis rakyat dalam memperjuangkan aspirasi politiknya kepada pemerintah, melalui penyampaian aspirasinya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dengan aspirasi rakyat.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh J. A Corry dan Henry J. Abraham yang dikutip oleh Haryanto dalam buku Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, mendefinisikan partai politik sebagai berikut :

*“Political party is a voluntary association among to get control of the government by filling elective offices in the government with in members”* (“Partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan”) (Corry dan Abraham dalam Haryanto, 1998:9).

Partai politik pada umumnya dikendalikan oleh sekelompok individu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya secara konstitusional. Namun, disamping mempertahankan kekuasaannya tersebut kadang terdapat tujuan dan cita-cita tertentu dari partai penguasa untuk membuat suatu kebijakan baik untuk partai maupun pemerintah. tetapi jika posisi partai tersebut sebagai oposisi, maka peran partai berlaku sebagai penyeimbang, pengontrol atau mengawasi kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira dalam buku Sitem Politik Indonesia, yang mendefinisikan partai politik sebagai beriku :

“Organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (*power endeavor*)” (Kantaprawira, 1988:62).

Partai politik lahir atas dasar kesepakatan bersama, dimana rakyat melakukan perjanjian atas asas kesatuan tujuan dan cita-cita pada keadaan tertentu. Tujuan dan cita-cita tersebut disatukan dalam platform dibawah ikatan suatu ideologi sebagai pedoman partai. Ideologi merupakan doktrin yang bersifat mengikat terhadap tujuan dan cita-cita itu di formulasikan dalam bentuk suatu wadah yang disebut sebagai platform partai.

Selain pendapat para ahli, pengertian partai politik terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan partai politik adalah :

“organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana rakyat bebas membentuk partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, yang kemudian dalam deklarasi berdirinya partai diatur dalam perundang-undangan melalui akta notaris. Dalam hal ini partai yang bersangkutan didaftarkan kepada departemen kehakiman dan selanjutnya dicatat keberadaannya sebagai institusi politik yang sah. Maka, dengan adanya suatu anggapan bahwa rakyat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan, serta diikutsertakan dalam proses politik dimanapun keberadaannya sebagai wujud dari rakyat yang patuh kepada negara.

### **2.1.1 Awal Munculnya Partai Politik**

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan politik. seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yang menjelaskan teori mengenai asal-usul berdirinya suatu partai politik sebagai berikut :

1. Teori kelembagaan, yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Pertama*, mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang (ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.
2. Teori Historik, yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. *Kedua*, menjelaskan krisis situasi historis yang terjadi jika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini akan memunculkan masalah seperti : penambahan penduduk, peningkatan mutu

pendidikan dan lain-lain. Maka, situasi ini menimbulkan tiga macam krisis yaitu : krisis legitimasi, intergrasi dan partisipasi. Perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, yang menimbulkan masalah identitas yang meyakinkan masyarakat sebagai kesatuan bangsa dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik.

3. Teori Pembangunan, yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. *Ketiga*, melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi dapat mempengaruhi lingkungan dan melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik. (Surbakti, 1992:113-114).

Munculnya partai politik didasarkan pada kondisi masyarakat pada saat itu,

dimana kebutuhan dalam menyampaikan aspirasi politik disampaikan melalui institusi politik yang resmi yaitu partai politik. Dari bahasan teori munculnya partai politik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik lahir atas dasar tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya antara rakyat dan pihak pemerintah sebagai cerminan kehidupan yang demokratis. Dengan demikian partai GOLKAR bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi keadilan, hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **2.1.2 Ciri-ciri Partai Politik**

Partai politik memiliki identitas atau ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan kelompok kepentingan. Adapun ciri-ciri partai politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik* disebutkan sebagai berikut :

1. Berakar dalam masyarakat lokal, artinya partai politik dibentuk atas kesepakatan masyarakat sebagai penyalur aspirasi, adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan hal penting. Masyarakat tidak hanya digunakan untuk menjelaskan liberalisasi

politik dan transisi demokrasi tetapi telah ditingkatkan sebagai sebuah prakondisi bagi konsolidasi demokrasi.

2. Melakukan kegiatan secara terus menerus, artinya kegiatan yang dilakukan oleh partai harus berkesinambungan, tidak bergantung pada masa jabatan dan masa hidup pemimpinnya.
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, artinya partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan agar dapat melaksanakan visi dan misi yang telah menjadi programnya.
4. Ikut serta dalam pemilihan umum, artinya untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik dinegara demokratis turut serta dalam pemilihan umum. (Lappalombara dan Weinner dalam Surbakti, 1992:114-115).

Partai politik lahir di lingkungan masyarakat secara spontan dan terbentuk dengan maksud untuk ikut berpartisipasi dan terlibat dalam politik praktis. Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan, partai politik merupakan forum resmi untuk menyampaikan aspirasi sedangkan kelompok kepentingan bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Kelompok kepentingan merupakan suatu gerakan sosial dalam masyarakat, sedangkan partai politik merupakan kesatuan politik masyarakat.

### **2.1.3 Tujuan Partai Politik**

Sebagai identitas dari partai politik, maka partai politik memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan partai politik yang dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia, menyebutkan bahwa partai politik bertujuan untuk :

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.
2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap tindakan, kelakuan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama

dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan).

3. Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat luas. (Kantaprawira, 1988:62).

Partai politik pada umumnya memiliki beberapa tujuan operasional yang diperluas menjadi tujuan utama secara khusus dibahas dalam keputusan-keputusan partai. Namun, secara hierarki tujuan partai yang lebih banyak ditemukan adalah ikut andil dan berpartisipasi dalam jabatan pemerintahan, disamping jabatan partai. Partai politik memiliki tujuan yang didasarkan pada aspek melembagakan partai dalam pemerintahan, dimana elit politik partai ikut serta untuk duduk dalam jabatan pemerintahan. Partai juga ikut mengawasi kinerja pemerintahan itu sendiri. Sehingga proses timbal balik dapat berjalan antara elit partai yang duduk di pemerintahan, dengan elit partai lainnya.

#### **2.1.4 Tipologi Partai Politik**

Menurut pendapat Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik, partai politik diklasifikasikan ke dalam tiga tipe. Adapun tipologi partai politik adalah sebagai berikut :

##### 1. Asas Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu :

- a. Partai politik pragmatis. Suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terkait kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut.
- b. Partai politik doktriner. Suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Artinya,



ideologi sebagai perangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.

- c. Partai politik kepentingan. Suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup secara langsung inin berpartisipasi dalam pemerintahan.

(Surbakti, 1992:121).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.

Menurut Budiarjo (2006:161) partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Partai politik merupakan organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara

langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum dan bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau kelompok kepentingan (*interest group*). Partai politik bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain seperti kelompok profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu.

Tipologi partai diarahkan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Seperti halnya partai pragmatis, biasanya cenderung mengutamakan gaya kepemimpinan pimpinannya. Berbeda dengan partai doktriner dimana sejumlah platform yang terprogram dalam partai dijabarkan dalam ideologi. Sedangkan partai kepentingan hanya mewakili dari bagian kelompok tertentu saja.

## 2. Komposisi dan fungsi anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya partai politik dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu :

- a. Partai massa/lindungan (*patronase*). Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung dari berbagai kelompok ke dalam masyarakat sehingga pemilu dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu.
- b. Partai kader. Suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

(Surbakti, 1992:122).

Tipologi partai diarahkan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Berdasarkan komposisinya, partai massa lebih mengutamakan jumlah anggota pendukungnya untuk merebut suara dalam pemilu dengan cara memobilisasi massa. Biasanya dalam pemilihan pemimpin partai massa, lebih dominan dengan faktor kedekatan seseorang dalam arti lindungan (*patronase*) dengan tokoh partai yang memiliki pengaruh. Dibandingkan dengan partai kader, faktor ketaatan dan disiplinnya organisasi adalah sumber kekuatan partai dalam meraih simpati masyarakat, baik dalam pemilu maupun agenda politik lainnya. Dalam hal ini GOLKAR menurut analisis penulis dapat digolongkan ke dalam partai kader. Karena GOLKAR menekankan pengkaderan sebagai kebijakan utama dan juga meningkatkan kualitas kader-kadernya.

### 3. Basis sosial dan tujuan

Gabriel Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosial, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu :

- a. Partai yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.
- b. Partai yang beranggotakan berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan pengusaha.
- c. Partai yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha
- d. Partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga tipe yaitu :

- a. Partai perwakilan kelompok, artinya partai politik yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

- b. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional, dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- c. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.  
(Almond dalam Surbakti, 1992:123-124).

Tipologi partai diarahkan untuk membedakan ciri partai satu dengan partai lainnya. Maka berdasarkan basis sosial dan tujuannya partai politik digolongkan berdasarkan pada tingkatan sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri, dan keduanya dihubungkan dengan tujuan atau kepentingan dari kelompok masyarakat dalam peran serta berpartisipasi politik. Disamping itu, faktor lain juga berpengaruh terhadap partai yang berbasis pada massa. Seperti sensitifitas partai dengan suatu aliran politik seperti pada basis kepentingan kelompok baik agama, suku bangsa, budaya dan lainnya. Sehingga peranan kelompok memberikan dorongan baik secara moral maupun spiritual untuk perolehan suara dalam pemilu.

### **2.1.5 Fungsi Partai Politik**

Fungsi utama partai politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program partai berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utamanya tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dimiliki partai politik, seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik, yang menyebutkan tujuh fungsi partai adalah sebagai berikut :

1. Fungsi sosialisasi politik
2. Fungsi rekrutmen politik
3. Fungsi partisipasi politik
4. Fungsi pemadu kepentingan
5. Fungsi komunikasi politik

6. Fungsi pengendali konflik
7. Fungsi kontrol politik  
(Surbakti, 1992:117-121).

Partai politik memiliki sejumlah karakteristik fungsi dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan politik dalam suatu negara. Fungsi partai politik satu sama lainnya memiliki hubungan dalam kelangsungan hidup politik partai. Analisis fungsi partai politik selama ini masih belum final, walaupun beberapa ahli politik telah mengasumsikan fungsi partai politik ke dalam tujuh fungsi utama, selain merebut dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional.

Secara mendasar partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan ideologi tertentu. Menurut Budiarto (2006:163-164) partai politik juga memiliki fungsi antara lain :

***a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik***

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja dalam segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga

penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

***b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik***

Fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan menepatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informasi maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik

dan pemerintah. partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

***c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik***

Fungsi partai politik yaitu seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

***d. Partisipasi Politik***

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. partai politik merupakan wadah partisipasi politik. fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

***e. Sebagai Sarana Pengatur Konflik***

Konflik selalu muncul di setiap lapisan masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama dan lain-lain,. perbedaan tersebut dapat meyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, menampung, dan memandukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, begitujuga halnya dengan partai politik. Adapun tujuan umum partai politik di Indonesia menurut Bastian, (2007:154) sebagai berikut :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagai termaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Perlu diperjelas bahwa partai berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malah ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat



ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (*group identity*) yang kuat.

## **2.2 Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang dimiliki partai, dimana pada pelaksanaan fungsi partai yang menjadi dorongan kuat adalah regenerasi politik partai. Rekrutmen politik lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang menyebutkan “proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai” (Budiardjo, 2000:164).

Kelangsungan hidup partai politik dapat terjamin melalui rekrutmen, baik keanggotaan maupun pemimpinnya. Umumnya rekrutmen politik lebih cenderung pada aspek pengadaan generasi muda yang memiliki bakat berorganisasi dan kepemimpinan, guna direkrut dalam suatu kegiatan politik bersama dengan partai politik.

### **2.2.1 Pengertian Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik merupakan suatu fungsi partai dalam hal pengadaan dan penyediaan generasi bangsa dalam suatu proses pendidikan politik baik untuk partai politik maupun negara. Rekrutmen politik ditemukan dalam sebuah organisasi, baik organisasi publik, sosial maupun organisasi politik dalam hal ini adalah partai politik. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Agus Pramono dalam buku *Elit Politik Yang Loyo Dan Harapan Masa Depan* mengemukakan definisi rekrutmen politik sebagai “proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota

kelompok untuk memiliki kelompoknya dalam jabatan administrasi maupun publik” (Pramono, 2005:30).

Rekrutmen politik pada dasarnya merupakan cara untuk mencari serta mengajak seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta dalam proses politik. Namun, pada dasarnya rekrutmen ditujukan pada regenerasi dan penyegaran dalam tubuh partai. Diman pada tahapan rekrutmen kadang terdapat suatu batasan, yaitu batasan pada ruang antar waktu. Secara global batasan ini mengikat pada tahapan rekrutmen pemimpin partai, maka faktor waktu kebersamaan dalam partai serta pengabdian pada partai lebih diutamakan.

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik*, yang dimaksud rekrutmen adalah

“seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin (Surbakti, 1992:118).

Proses rekrutmen politik partai baik keanggotaan maupun pemimpin partai merupakan sebuah proses seleksi anggota maupun pemimpin serta pengangkatan pemimpin partai, untuk menempatkan sejumlah peranan jabatan politik dalam partai. Biasanya rekrutmen politik bukan hanya sebuah proses politik saja, melainkan sebagai ajang untuk mencari anggota yang berbakat, khususnya dibidang organisasi dan kepemimpinan. Namun, rekrutmen politik juga bisa diterapkan pada lingkungan pemerintahan secara khusus disamping pada partai politik pada umumnya.

Pendapat lainnya mengenai rekrutmen politik dikemukakan oleh Czudnowski dikutip oleh Fadillah Putra dalam buku Partai Politik dan Kebijakan Publik, yang mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah :

*“the process through which individuals are inducted into active political roles”* (“suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif”) (Czudnowski dalam Putra, 2004:256).

Rekrutmen politik dijadikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan penyediaan individu maupun kelompok individu, untuk diikutsertakan dalam proses politik. umumnya proses ini melibatkan partai politik untuk melakukan kontrak politik terhadap individu yang berbakat untuk dijadikan sebagai elit politik lokal maupun nasional.

Rekrutmen politik partai dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik. rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di masyarakat.

### **2.2.2 Mekanisme Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara. Karena proses rekrutmen ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik Negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut mekanisme rekrutmen yang

berbeda-beda. Anggota politik yang direkrut memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Tidak hanya itu, partai politik juga memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Mekanisme rekrutmen politik sesuai dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Rekrutmen politik partai dilakukan melalui mekanisme yang dilakukan oleh partai. Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah “proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu : *sifat tertutup*; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. *Sifat terbuka*; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka” (Rush dan Althoff, 1997;248-249).

Proses perekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase (lindungan) dalam proses perekrutannya. Faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh, terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai berlangsung. Rekrutmen politik meliputi aspek; subjek politik dalam arti manusia, dan objek politik dalam arti partai politik.

Menurut A. Rahman H.I (2007:247), menyatakan bahwa mekanisme dalam melaksanakan rekrutmen politik dapat dibagi menjadi beberapa cara yaitu :

1. Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (political right) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. *Fit and Propertest* yaitu pola rekrutmen yang dilakukan oleh Legislatif (DPR) melalui mekanisme *Fit and Propertest* (uji kelayakan dan kepatutan) adalah khusus ditujukan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu.
3. Seleksi CPNS yaitu pola rekrutmen ini adalah pola yang dilakukan oleh institusi Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI. Semua peraturan mengenai pelaksanaan test penerimaan CPNS ditetapkan oleh MENPAN RI, sedangkan surat keputusan pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Surbakti (1999:25) bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedur rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

Suharno (dalam Inu Kencana, 2009:58) menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga poltiik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Ada dua macam mekasnisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama

untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritas. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elit itu sendiri.

Anggota merupakan basis sebuah partai, semakin banyak anggota semakin kuat partai tersebut. Melihat pernyataan tersebut partai harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya dan menjaga anggota untuk tetap puas sebagai anggota partai.

Teori rekrutmen menurut Almond dan Powell (dalam Prihatmoko, 2005; 200-203) rekrutmen politik adalah suatu proses dimana perseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting didalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi. Teori Almond dan Powell (dalam Prihatmoko, 2005:200-203) prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu :

1. *Prosedur tertutup* artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang.
2. *Prosedur terbuka* artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang akan menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan

secara terbuka dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER :  
Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil.  
Didalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang

perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya, antara lain :

- a. *Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan dari kelompok atau individu*  
artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. karena dunia politik merupakan dunia yang dipenuhi dengan persaingan taktik dan teknik. Orang-orang yang terlibat dalam politik adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan dan memenuhi kriteria yang dianggap menguntungkan bagi negara dan juga partai-partai tertentu.
- b. *Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi* artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi dampak besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G. Bigham Powell menjelaskan

“rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi kesimpulannya setiap individu harus mempunyai kemampuan yang dapat diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.

- c. *Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial*. Dizaman modern ini jalur rekrutmen primordial tidak menutup kemungkinan terjadi didalam politik. fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangakan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Hal ini disebut sebagai “rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial” contohnya ketika seorang raja wafat maka kekuasaannya akan diserahkan kepada anak-anaknya atau kerabat dekat lainnya yang memiliki persamaan marga atau suku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rekrutmen politik adalah :

1. Faktor pertama bukan tentang siapa yang akan menjadi bakal calon pemimpin untuk negeri kedepannya melainkan lebih menekankan terhadap persoalan disekitar politik, kekuasaan rill dan berada disuatu historis.
2. Persoalan disekitar politik berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimalkan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala permasalahan yang sedang terjadi dinegara ini untuk dipersempit dampaknya. Sehingga iming-iming tersebut menjadi



daya tarik bagi masyarakat untuk memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.

3. Kekuasaan rill berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan didalam konsep pikirannya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin. Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama.
4. Unsur terakhir adalah berada dalam historis yang berarti setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu ada dalam pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu merangkai konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.

Selanjutnya yang perlu dikaji adalah pentingnya mengetahui pembagian jabatan didalam politik yaitu :

- a. Jabatan politik artinya jabatan yang diperoleh sebagai dari hasil pemilihan rakyatnya atau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan dikenal sebagai seorang politikus. Masa jabatannya hanya dua kali periode.
- b. Jabatan administratif artinya jabatan yang diperoleh secara manual melalui tahap-tahap pendidikan dan pelamaran kerja. Jabatan ini dianggap pasti dan mampu menjamin hidup para administrator karena masa jabatannya berlangsung lama. Para administrator ini dikenal sebagai atribut negara karena menjadi indikator pelengkap dan pendukung dalam membantu tugas para politikus.

Sistem perekrutan politik terdiri dari beberapa cara yaitu :

1. Seleksi pemilihan melalui ujian
2. Latihan (training). Kedua hal tersebut menjadi indikator utama didalam perekrutan politik.
3. Penyortiran atau penarikan undia (cara yang digunakan diyunani kuno)
4. Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik.
5. Perebutan kekuasaan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan. Cara ini tidak untuk dicontoh karena menjadi seorang pemimpin tidak harus melakukan tindakan kekerasan,. Kita telah di didik untuk menerapkan teknik-teknik yang baik dalam berpolitik.
6. Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli melalui relasi terdekat. Petronag memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi.
7. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.

Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Bila mengkaji pola-pola tersebut maka kita akan mengetahui bahwa sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial terkandung didalam rekrutmen politik. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen mampu membangkitkan konflik didalam masyarakat dalam tingkatan-tingkatan peran masyarakat. Konflik ini berpengaruh besar dalam hubungan antar masyarakat. Pola-pola rekrutmen poltiik ini secara tidak sengaja menjadi indikator yang penting untuk melihat

pembangunan dan perubahan suatu negara. Didalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekrutmen dan perekonomian suatu negara mampu mengkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat, artinya pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengara pada kemajuan negaranya serta faktor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi negara.

Struktur organisasi partai politik harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang ideal menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai dengan kebutuhan maka semakin tinggi pula pelembagaan organisasi yang bersangkutan.

Terdapat beberapa bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu :

Pertama, keutuhan internal, suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalime internal). Adanya dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik kedepan. Karena itu, ada beberapa hal penting guna meumbuhkan keutuhan internal partai yaitu : mendorong dialog demokrasi didalam tubuh partai, meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai dan memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian.

Kedua, ketangguhan organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber daya ke level yang lebih rendah dari pada ditingkat pusat/nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik disemua level administrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya dapat bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang aktual dan permanen dalam partai politik sangat berguna bagi institusionalisasi dan perkembangan partai.

Ketiga, Identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya untuk mengejar jabatan dipemerintahan. Karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citrayang perlu dibangun dalam mengkonstruksi identitas partai yang kuat. Dukungan suara pada partai politik memerlukan strategi yang konkret. Dan salah satu jalan yang paling tepat adalah meraup dukungan pemilih adalah melalui mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan dukungan dari para voters, partai politik harus mengorganisasi sumber daya internal partai. Untuk tujuan itu partai harus memiliki gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih.

Terkait dengan hal diatas, dalam mendekati konstituen dengan partai politik dukungannya, maka perlu metode dan strategi yang dibentuk untuk tujuan keperluan itu. Setidaknya ada empat aktivitas yang dapat dilakukan pertama,

melakukan pendidikan dan pemberdayaan warga. Pendidikan politik, melalui *civil education* (pendidikan warga), *voter education* (pendidikan pemilih), dan dialog terbuka.

### **2.3 Hasil Penelitian yang Relevan**

Secara keseluruhan ada yang menjadi pilihan penelitian yang relevan untuk diajukan sebagai rujukan bagi penulisan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut :

Salah satu penelitian yang Relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Madin Silalahi, Universitas Darma Agung (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sumatra Utara”. Dalam skripsi ini Madin Silalahi menjelaskan tentang adanya fenomena dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang dilakukan oleh partai Perindo pada pemilu legislatif 2019 di Sumatra Utara. Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Madin Silalahi dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang rekrutmen perempuan dalam partai politik dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah, penulis melakukan penelitian tentang pola rekrutmen kader perempuan dalam kepengurusan partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan menggunakan teori menurut Almond dan Powell dalam “Pemilihan Kepada Daerah Langsung” (Prihatmoko, 2005:200-203) tentang proses rekrutmen politik prosedur terbuka dan tertutup. Adapun penelitian Madin Silalahi, melakukan penelitian tentang pola rekrutmen calon legislatif perempuan

partai politik Perindo pada pemilu legislatif 2019 di Sumatra Utara dengan menggunakan teori menurut Czudnomski dalam “partai politik dan kebijakan publik” (Fadillah, 2008:77) tentang proses rekrutmen politik.

Salah satu penelitian relevan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hengki Hayatullah, Universitas Tanjungpura (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Oleh Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Pada Pemilihan Umum 2019. Dalam skripsi ini Hengki Hayatullah mencoba menjelaskan mengenai proses dan hambatan dalam rekrutmen perempuan dalam pemenuhan syarat 30%. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang rekrutmen perempuan dalam partai politik dan menggunakan metode dan teori yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif dan teori menurut Almond dan Powell dalam “Pemilihan Kepala Daerah Langsung” (Prihatmoko, 2005:200-203) tentang proses rekrutmen politik prosedur terbuka dan tertutup. Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian rekrutmen kader perempuan dalam kepemimpinan partai Golkar.

### **2.3 Kerangka Pikir**

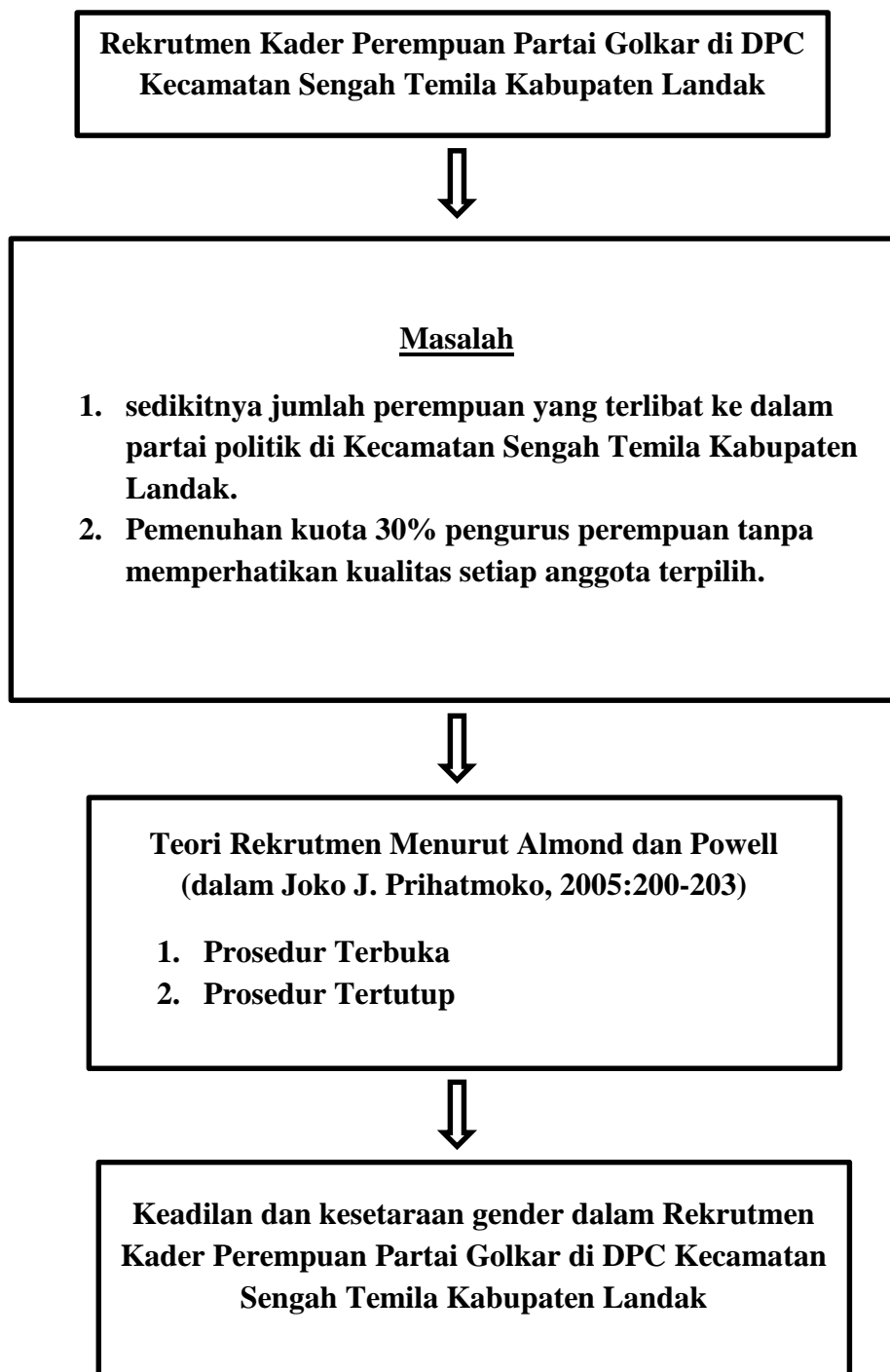
Dari beberapa teori yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini akan lebih cenderung melihat pola rekrutmen sebagai bagian proses politik dimana partai politik memberi kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan partai sesuai dengan Undang-undang. Keterlibatan perempuan dalam partai Golkar Kecamatan Sengah Temila memiliki masalah terkait minimnya pengetahuan dan kualitas setiap anggota yang terlibat. Dalam hal ini pola

penetapan setiap anggota tentunya melalui pola rekrutmen yang aspek-aspek didasarkan pada tertentu.

Dari kerangka pikir ini dapat dijelaskan bahwa identifikasi masalah yang ada adalah kurangnya partisipasi perempuan yang terlibat dalam kepengurusan partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan pemenuhan kuota 30% pengurus perempuan tanpa memperhatikan kualitas anggota terpilih.

Untuk meneliti masalah tersebut, peneliti menggunakan teori menurut Almond dan Powell (dalam Prihatmoko, 2005:200-203) tentang prosedur-prosedur rekrutmen politik terbuka dan tertutup. Dari semua pemikiran tersebut, maka untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang dikemukakan, akan digambarkan skema berpikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian**





## **2.5 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan yang akan diajukan didalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 2.5.1. Bagaimana prosedur rekrutmen terbuka kader perempuan di kepengurusan Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?
- 2.5.2. Bagaimana prosedur rekrutmen tertutup kader perempuan Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?